



## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BANSOS RASTRA BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN PASIRKAREUMBI KABUPATEN SUBANG**

**Gina Nur Alifah<sup>1)</sup>, Dahly Sukmapryandhika<sup>2)</sup>, Lukman Munawar Fauzi<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Bansos Rastra Bagi Masyarakat Di Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang”. Masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas program bansos rastra (beras sejahtera) di kelurahan Pasir Kareumbi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekspalanatif penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara , kuisioner atau angket dan google form. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*). Teknik Sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling dengan jumlah Populasi 1.572 yang menerima bansos rastra dan sampel yang di hasilkan sebanyak 104. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata rata variabel Implementasi kebijakan pemerintah (X) Dari Variabel X ( Implementasi Kebijakan ) dapat disimpulkan total keseluruhan sebesar 2.461 termasuk dalam kategori Cukup karena berada di interval 2.165 -2.830 dengan Presentase 59,1%. Sedangkan Dari Variabel Y ( Efektivitas Program) dapat disimpulkan total keseluruhan sebesar 2.858 termasukn dalam kategori Cukup. karena berada di interval 2.165 -2.830 dengan presentase 68,7%, dikarenakan nilai thitung >ttabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas program bansos rastra berpengaruh signifikan bagi masyarakat di Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang.

**Kata Kunci** : Implementasi, Efektivitas, Program Bansos Rastra.

### **Abstract**

*This research is entitled “The Effect of Government Policy Implementation on the Effectiveness of the Rastra Social Assistance Program for the Community in Pasirkareumbi Village, Subang Regency”. The problem of this research is to find out the implementation of government policies on the effectiveness of the Rastra social assistance program (welfare rice) in Pasir Kareumbi village. The method used in this research is a survey research*

*expalanative method with a quantitative approach. The data collection techniques used are observation, interview, questionnaire or questionnaire and google form. This research was conducted with the help of the SPSS (Statistical Package for the Social Science) program application. The sample technique used was Simple Random Sampling with a population of 1,572 who received Rastra social assistance and the resulting sample was 104. The results of this study indicate that the average value of the variable Implementation of government policy (X) From Variable X (Policy Implementation) it can be concluded that the overall total of 2,461 is included in the Sufficient category because it is in the interval 2,165 -2,830 with a percentage of 59.1%. While from Variable Y (Program Effectiveness) it can be concluded that the overall total of 2,858 is included in the Sufficient category. because it is in the interval 2,165 -2,830 with a percentage of 68.7%, because the  $t_{count} > t_{table}$  value, then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. This means that the implementation of government policies on the effectiveness of the Rastra social assistance program has a significant effect on the community in PasirKareumbi Village, Subang Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Effectiveness, Rastra Social Assistance Program*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan untuk melaksanakan agenda kebijakan dan pembangunan. Kebijakan adalah bentuk dari adanya kompromi , sinergi dan kompetensi dari berbagai gagasan, landasan teori, ideologi, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Kebijakan pemerintah bisa berupa kebijakan publik dalam UUD 1945, kebijakan publik dalam bentuk produk hukum lainnya, dan kebijakan publik dalam bentuk program lainnya.

Dalam merumuskannya pemerintah memiliki Peran dan fungsi yaitu Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Pemerintah yang memiliki peranan aktif dalam hal tersebut adalah kementerian sosial, karena kementerian sosial merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang – bidang tersebut bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat.

Suatu program tidak cukup apabila hanya pemerintah saja yang bergerak dan andil, perlu adanya kerja sama dan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat agar program yang dibuat. Untuk mewujudkan suatu program, pemerintah juga terkadang membutuhkan kerjasama dengan pihak – pihak swasta, itu dilakukan agar mendapat bantuan dan dorongan dikala kapasitas dari pemerintah kurang maksimal.

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya adalah dengan program bantuan sosial. Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk yang dikategorikan miskin secara ekonomi, dengan penerapan prinsip solidaritas vertikal karena tidak adanya kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah membuat program Bansos Rastra. Bansos Rastra merupakan bantuan pangan dalam bentuk beras yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya. Bansos Rastra diberikan dalam bentuk beras fisik dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kuantitas beras yang disalurkan adalah sebesar 10 kg dengan kualitas beras medium, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen. Diharapkan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.

Adapun salah satu kelurahan penerima manfaat dari Bansos rastra adalah Kelurahan PasirKareumbi Kecamatan Subang. Keadaan data sebagai modal dasar (potensi) yaitu Kelurahan pasirkareumbi memiliki jumlah penduduk 13.988 jiwa, Kepala keluarga 4.954 kk.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat dilihat bahwa jumlah

penerima bantuan beras sejahtera (Bansos Rastra ) di Kelurahan PasirKareumbi Kabupaten Subang adalah sebanyak 19.941. Dalam hal ini terbilang masih banyak masyarakat yang mendapat bantuan beras dibanding kelurahan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan memfokuskan permasalahan yaitu sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas program bansos rastra bagi masyarakat di Kelurahan PasirKareumbi Kabupaten Subang.

### **Kebijakan Pemerintah**

Makna kebijakan menurut pandangan James Anderson (dalam Wahab 2021:7) menyatakan bahwa kebijakan merupakan langkah-langkah yang secara sengaja dilakukan oleh aktor ataupun sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Pemerintah menurut Ndraha (2005:57) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Bridgeman (2004) (dalam Tuwu, 2020 :270) kebijakan pemerintah ialah apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah yaitu untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan-keputusan yang sudah dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk mengatur suatu hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk tujuan tertentu.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Model implementasi kebijakan van Meter dan van Horn disebut dengan istilah A model of The Policy Implementation model pendekatan yang dirumuskan tersebut mengandalkan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kepuasan politik yang tersedia.

## **Program Bansos Rastra**

Bansos Rastra Beras Sejahtera adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat. Bansos Rastra merupakan implementasi dari pasal 6 ayat (1) huruf e Permenkeu No. 254 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016, yaitu dalam rangka Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

### **Efektivitas**

Sedangkan menurut Effendy dalam (Widyaningtyas, 2019:18) menjelaskan pengertian efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa efektivitas tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif penelitian survei yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh masyarakat/penduduk di Kelurahan PasirKareumbi Kabupaten Subang yang berjumlah 1.572 penduduk. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan di penelitian ini adalah *Non*

*Probability Sampling* dengan jenis *Purposive Sampling*. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya akan diuji validitasnya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu, data akan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil uji normalitas (X)  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean	33.73
		Std. Deviation	2.717
Most Extreme Differences	Absolute		.172
	Positive		.172
	Negative		-.089
Test Statistic			172
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			<,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		<,001
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525

**Tabel 2. Hasil uji normalitas (Y)  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean	39.25
		Std. Deviation	4.723
Most Extreme Differences	Absolute		.150
	Positive		.148
	Negative		-.150
Test Statistic			.150
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			<,001

Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		<,001
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

Berdasarkan hasil.000 penelitian hasil uji normalitas diatas ,dapat diketahui bahwa nilai uji normalitas untuk kedua variabel yaitu X dan Y tidakberdistribusi normal, hal tersebut dapat dilihat dari nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed)d sebesar  $0.000 < 0,05$ .

### Analisis Regresi Sederhana

**Tabel 3. Analisis regresi sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.548	5.185		2.420	.017
	Implementasi kebijakan (X)	.792	.153	.455	5.167	<,001

a. Dependent Variable: Implementasi kebijakan

$$Y = 12.548 + 0.792 X$$

Merujuk pada hasil koefisien regresi pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa nilai a adalah constant dari unstandardized coefficients yaitu sebesar 12.548 yang merupakan angka konstanta yang berarti jika tidak ada perubahan nilai dari variabel Implementasi kebijakan (X) maka efektivitas program (Y) adalah 12.548. Sedangkan b adalah angka koefisien regresi dari variabel Implementasi kebijakan yaitu sebesar 0.792 yang artinya bahwa setiap penambahan 1% implementasi kebijakan, maka akan memberikan peningkatan efektivitas program sebesar 0.792 bagi masyarakat dikelurahan PasirKareumbi

## Analisis Koefisien Korelasi

**Tabel 4. Analisis koefisien korelasi**

<b>Correlations</b>			
		Implementasi kebijakan	Efektivitas program
Implementasi kebijakan (X)	Pearson Correlation	1	.448
	Sig. (2-tailed)		<,001
	N	104	104
Efektivitas program (Y)	Pearson Correlation	.448	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	
	N	104	104

Berdasarkan tabel diatas analisis koefisien korelasi, bahwa nilai korelasi antara X Implementasi Kebijakan dengan variabel Y efektivitas program adalah 0.448 . Berdasarkan nilai korelasi tersebut berada di kategori sedang karena berada di interval 0,40 – 0,599. Itu artinya hubungan antara implementasi kebijakan dan efektivitas program di Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang, kekuatan hubungannya sedang yaitu sebesar 0,448.

## Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 5. Analisis koefisien determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448	.201	.532	.283
a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan (X)				

Berdasarkan tabel diatas analisis koefisien determinasi, maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya adalah 0.201 atau sebesar 20,1% hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas program di Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang sebesar, 20,1% sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak peneliti masukan dalam penelitian ini.



## Uji t

**Tabel 6. Uji t Parsial**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.548	5.185		2.420	.017
	Implementasi Kebijakan(X)	.792	.153	.455	5.167	<,001

a. Dependent Variable: Efektivitas Program (Y)

Berdasarkan uji hipotesis (uji t) pada tabel di atas , dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.167 yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  1,660 dan dapat juga dilihat dari nilai signifikansi yaitu  $<,001 >$  0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas program bagi masyarakat di Kelurahan Pasirkareumbi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian mengenai pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas program bansos rastra bagi masyarakat di Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan program bansos rastra ini sudah berjalan dengan baik dan selalu ada pertemuan antara pihak kelurahan pasirkareumbi dan masyarakat penerima bansos setiap satu sampai dua Bulan Sekali.
2. Masyarakat memang masih tergolong kurang mampu namun karena adanya program Bansos Rastra membuat masyarakat / warga lebih merasa berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.

3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas program bagi masyarakat di Kelurahan Pasirkareumbi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ndraha , T. (2005). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ndraha, T. (2011). Kybernologi Ilmu Pemerintahan 1. Jakarta: Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Menteri keuangan No. 254 Tahun 2015 Tentang tujuan dan manfaat bansos rastra.

Supriyadi, A. (2019). AIRMANSHIP. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi-COVID19. Journal Publicuho, 3.

Wahab, S. A. (2018). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.

Widyaningtyas, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Transportasi (Studi kasus: Pemukiman Dalam Mengurangi Tingkat Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bandung Barat.

Wirnano, B. (2011). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta.

